

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021-2023)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Zahrotul Mukaiyaroh

NIM: 31402100006

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS
EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Skripsi

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN
ASLIDAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021-2023)

Disusun Oleh:

Zahrotul Mukhaiyarah NIM: 31402100006

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan
kehadapan sidang panitia ujian usulan penelitian skripsi Program Studi S1
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 5 Mei 2025

Menyetujui :

Pembimbing

Dr. Sri Anik, S.E., M.Si

NIK. 210493033

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD), DANA PERimbangan, BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021-2023)**

Disusun oleh:

Zahrotul Mukhaiyarah
NIM: 31402100006

Telah dipertahankan didepan penguji Pada tanggal, 05 Maret 2025

Dosen Pembimbing


Dr. Sri Anik, SE, Msi
NIK. 210493033

Dosen Reviewer


Sutapa, S.E.M., Si., Ak., CA
NIK. 0601057001

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Pada Tanggal 05 Maret 2025

Ketua Program Studi S1 Akuntansi


Provita Wijayanti, SE, M.Si., Ph.D., AK., CA., IFP, AWP
NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zahrotul Mukhoiyaroh

Nim : 31402100006

Dengan ini menyatakan bahwakarya tulis yang berjudul:

**“PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH,PENDAPTAN ASLI DAERAH(PAD),
DANA PERIMBANGAN,DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH”**

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiarism, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berada.

Semarang, 05 Mei 2025

Penulis



Zahrotul Mukhoiyaroh

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Zahrotul Mukhaiyarah

NIM : 31402100006

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMERJAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH “ merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dengan cara yang baik sesuai dengan kode etik atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran kode etik ilmiah dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 03 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Zahrotul Mukhaiyarah

NIM. 31402100006

HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahrotul Mukhaiyarah

NIM : 31402100006

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul ***“PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ”*** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberi Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 Mei 2025

Yang menvatakan,



Zahrotul Mukhaiyarah
NIM. 31402100006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah Subnahahu Wa Ta'ala atas limpahan berkat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”** (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021-2023).

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program S1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sultan Agung Semarang. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan. Dukungan, arahan, bimbingan, petunjuk serta fasilitas beberapa pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Sri Anik, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi dalam menyusun proposal skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, serta seluruh staff tata usaha

dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan proposal skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak Sumadi, beliau yang menjadi, beliau yang menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi perempuan yang kuat dan tegar dalam segala rintangan.
6. Ibu Jumirah, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan do'a yang selalu berikan yang tiada henti memina kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Kakakku pertama ahmad zainuddin, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi berjuang karena dia termasuk orang yang telah menjadikan penulis untuk lebih kuat.
8. Kakakku ke dua Hani'atus sa'adah, yang selalu menjadikan penulis untuk lebih bersemangat menyelesaikan bangku perkuliahan, terimakasih atas dukungan, materi, dan motivasi belajar sehingga penulis lebih kuat dan semangat, kata yang sering diucap beliau “ Raihlah cita-cita yang yang selama ini diimpikan dan selalu ingat pada kedua orang tua”
9. Kepada seluruh keluarga besar mbah ngajo, pak lek Giman, Alwi, buk lek girah,ginah dan wakini, dan sepupu penulis yang memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan tepat waktu Sa'adatul Inayah S.H dan Imam Junaidi S.T, serta seluruh sepupu penulis (Muhammad Abdullah khafid, yahya khoirul mankafa, nuriya Laila febria, dan akila yumna zahroni) hinggapenulis sarjana.

10. Kepada pak de H.Sutriyono,S.Pd,M.Si yang meberikan motivasi serta semangat belajar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabatku pejuang gelar Wiwi Febiana K,Dita Emilia Utami, Arlin Tamariksa, Inarotul Laily yang selama ini telah membantu dan banyak memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya,yaitu pemilik nama dari *M.khoirul Anas* (mahasiswa ma'had ali al-anwar sarang) terimakasih untuk dukungan semangat,serta menjadi tempat keluh kesah dari awal pengerjaan skripsi,terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu support system dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seseorang yang pernah bersama saya, terimakasih untuk patah hati yang di berikan saat proses penyusunan skripsi yang sekarang bisa menjadi pengingat untuk saya menjadi alasan saya untuk terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik.Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan penulis.
14. *Last But Not Least*, kepada diri saya Zahrotul Mukhaiyaroh yang sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih hidup dan berusaha walau seringkali merasa tertinggal atas segala pencapaian. Untuk diriku “apapun kurang dan lebih mu mari merayakan sendiri”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 05 Mei 2025

Penulis

Zahrotul Mukhaiyarah

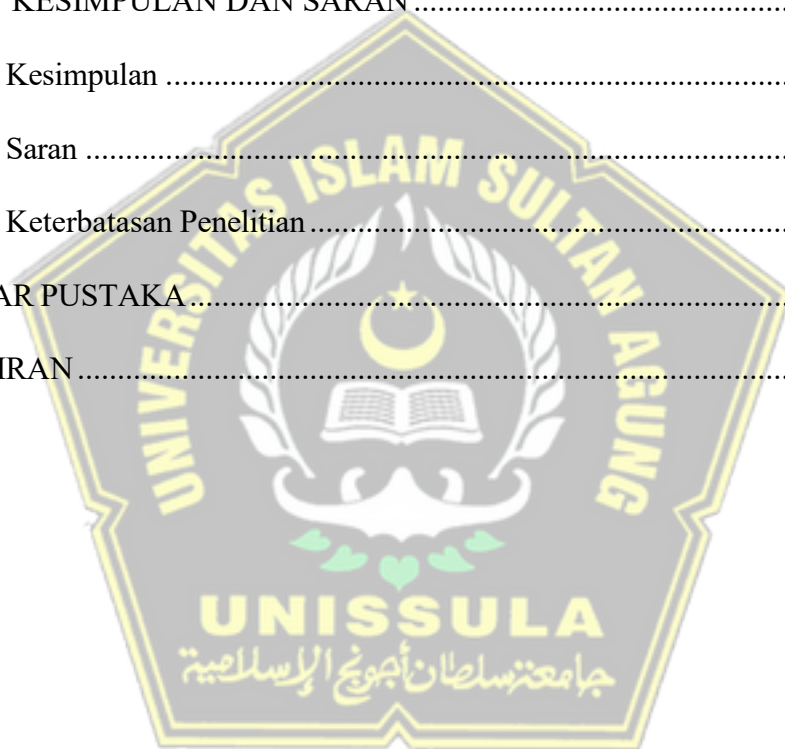


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.2 Variabel-Variabel Penelitian	13
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	18
2.4 Kerangka Penelitian Teoritis & Pengembangan Hipotesis	25
2.5 Kerangka Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Populasi dan Sampel.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33



3.4	Metode Pengumpulan Data	33
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1	Gambaran Umum Penelitian	47
4.2	Hasil Penelitian	47
4.3	Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	63
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66
LAMPIRAN.....		71



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	27
-------------------------------------	----





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal menjadi variabel yang sering dianalisis karena perannya yang signifikan dalam memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Definisi inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan bidang keuangan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menentukan kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dimana otonomi daerah telah menjadi elemen penting

dalam reformasi pemerintahan, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi semakin relevan. Salah satu perwujudan otonomi daerah dalam mengelola keuangan terdapat pada Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor perekonomian yang melimpah dan terus berkembang, hal ini dibuktikan dengan maraknya pembangunan- pembangunan yang sudah maupun sedang dilaksanakan (Nurlita, 2019).

Ukuran pemerintah daerah, yang dapat dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, atau kapasitas sumber daya, memiliki implikasi terhadap kompleksitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dengan ukuran besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Namun, ukuran yang besar juga sering kali disertai dengan tantangan dalam mengelola anggaran secara efisien (Sutrisno & Widodo, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang berbasis tanggung jawab (stewardship) untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola secara transparan dan tepat sasaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama yang mencerminkan kemandirian finansial pemerintah daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2018).. Dalam perspektif teori stewardship, pengelolaan PAD yang bertanggung jawab menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dana perimbangan, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), berperan sebagai sumber pembiayaan tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan belanja daerah. Pengelolaan dana perimbangan yang efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Teori stewardship menekankan bahwa dana ini harus dikelola secara akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Rahmawati & Basuki, 2020).

Dalam kaitannya dengan teori stewardship, kepala daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan demi kepentingan masyarakat. Stewardship yang baik tercermin dari pengelolaan keuangan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pemerintah daerah yang mengadopsi prinsip-prinsip stewardship diharapkan dapat memanfaatkan PAD dan dana perimbangan secara optimal, terlepas dari besarnya ukuran pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang signifikan, menawarkan konteks yang relevan untuk mengkaji hubungan antara ukuran pemerintah daerah, PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan. Dengan berbagai karakteristik daerah, seperti perbedaan dalam potensi PAD, jumlah penduduk, dan luas wilayah, terdapat peluang untuk memahami bagaimana faktor-faktor

tersebut memengaruhi pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Analisis terhadap data tahun 2021-2023 dapat memberikan gambaran terkini mengenai pengelolaan keuangan daerah di Jawa Tengah.

Hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberikan tambahan perspektif bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan tujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat (Antari & Sedana, 2018a).

Pelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor kunci yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri, sementara Dana Perimbangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah pusat. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Ukuran Pemerintah Daerah mencakup karakteristik pemerintah daerah yang dapat memengaruhi kebijakan dan pengelolaan keuangan.

(Maulina et al., 2021) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mustanda, 2019) menghasilkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Darmayanti, 2019) menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sangat beragam, mulai dari ukuran pemerintah daerah, kemampuan dalam mengelola pendapatan, hingga pengelolaan keuangan dan pembagian dana dari pemerintah pusat.

Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset yang dimiliki daerah tersebut. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi

masyarakatnya harus didukung oleh aset yang memadai. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Maulina afia,mustafa akmal, 2021) bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Padang, 2023), Artinya ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu factor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh (Adinata & Efendi, 2022) serta (Sari & Mustanda, 2019a) menemukan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,.(Purwanti, 2021) menemukan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah, dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, sistem pembayaran yang adil, rasional, proporsional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana

yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah yang penghasilannya berdasarkan angka presentase tertentu dengan maksud mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Maulina afia,mustafa akmal, 2021) menemukan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.(Nauw & Riharjo, 2021) menemukan hasil bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh pterhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Walaupun telah ada penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai variabel-variabel terkait. Namun pada kenyataannya, hasil dari penlitianterdahulu masih terdapat perbedaan atau ketidakkonsistenan antara peneliti satu dengan peneliti yang lain. Merujuk pada hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Primbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (2021-2023).

1.2 Rumusan Masalah

Analisis kinerja keuangan membantu memastikan bahwa pemerintah daerahmenggunakan sumber daya publik secara transparan dan akuntabel. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik dikelola dandialokasikan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah “Bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Primbangan, dan Belanja

Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (2021-2023??. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
4. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Praktis

1. Bagi pihak pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak Pemerintah Daerah/kota mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
2. Bagi pihak lainnya, sebagai referensi tambahan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemda.
3. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan, terutama mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, dana perimbangan, belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Pemahaman ini bermanfaat untuk mengembangkan teori dalam bidang ekonomi publik, khususnya terkait dengan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara efisien.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.

2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* menjadi grand teori dalam penelitian ini, Menurut (Donaldson & Davis, 1991) *stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan individu melainkan lebih fokus pada kepentingan organisasi. Teori *stewardship* juga merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya et al., 2017). Dalam konteks pemerintah daerah, teori ini relevan karena para pengelola keuangan daerah, seperti kepala daerah dan perangkat lainnya, diharapkan bertindak sebagai steward untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan akuntabel.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu pertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards (manajer dan auditor

internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Haliah, 2013).

Ukuran pemerintah daerah, yang biasanya diukur berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah pegawai, memiliki kaitan dengan teori stewardship. Dalam konteks ini, pemerintah daerah yang besar memiliki tanggung jawab lebih besar sebagai steward untuk mengelola sumber daya secara efisien. Ukuran yang lebih besar sering kali berbanding lurus dengan kebutuhan belanja yang lebih tinggi, sehingga pengelolaan yang buruk dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan. Sebaliknya, stewardship yang baik akan mendorong efisiensi pengeluaran dan optimalisasi sumber daya dalam skala besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama kemandirian keuangan daerah. Dalam perspektif teori stewardship, pengelola keuangan daerah memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk mengoptimalkan PAD tanpa melanggar prinsip keadilan dan keberlanjutan. PAD yang dikelola secara bertanggung jawab mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi lokal untuk mendukung pembangunan. Dengan demikian, PAD yang tinggi menunjukkan efektivitas pengelola sebagai steward dalam memanfaatkan aset daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Dana perimbangan, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung kebutuhan belanja daerah. Teori stewardship memandang bahwa dana ini

harus dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Stewardship yang baik akan memastikan bahwa dana perimbangan dialokasikan sesuai prioritas, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengurangan kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Belanja modal merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, karena secara langsung berkaitan dengan peningkatan aset tetap dan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif Teori Stewardship, belanja modal mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai steward atau pengelola sumber daya publik yang dipercayakan oleh masyarakat. Teori ini berasumsi bahwa para pengelola tidak semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi lebih mengutamakan pencapaian tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Teori Stewardship menggarisbawahi pentingnya integritas dan komitmen pengelola untuk memastikan bahwa belanja modal tidak hanya mendukung stabilitas keuangan, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Kinerja keuangan daerah mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam kerangka teori stewardship, kinerja keuangan yang baik menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab terhadap sumber daya publik. Indikator kinerja keuangan, seperti rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian, dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola PAD, dana perimbangan, dan sumber daya lainnya dengan baik.

Teori stewardship juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang transparan dalam pengelolaan PAD dan dana perimbangan akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Akuntabilitas yang tinggi memastikan bahwa setiap alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana pembangunan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap pemerintah daerah. Selain itu, teori stewardship menggarisbawahi pentingnya pengelolaan berbasis kinerja (performance-based management).

Ukuran pemerintah daerah memengaruhi kompleksitas pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan. Pemerintah daerah yang lebih besar membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih kompleks dan terintegrasi. Stewardship yang baik memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menangani tantangan ini dengan mengadopsi teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan.

Pentingnya teori stewardship dalam konteks pengelolaan keuangan daerah terletak pada kemampuannya untuk mendorong inovasi dan efisiensi. Pemerintah daerah yang bertindak sebagai steward akan terus mencari cara untuk meningkatkan PAD dan memanfaatkan dana perimbangan secara optimal. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

2.2 Variabel-Variabel Penelitian

2.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah memberikan informasi terkait dengan seberapa besar atau kecil pemerintah daerah tersebut. Dalam mengukur ukuran pemerintah daerah dapat digunakan berbagai proksi dari hal-hal

tertentu. Sari dan Mustananda (2019) menggunakan total aset pemerintah daerah sebagai basis untuk mengukur ukuran pemerintah daerah. Sari Rusmita (2019) juga menggunakan total aset sebagai basis untuk mengukur ukuran pemerintah daerah. Dalam penelitian ini variabel Ukuran Pemerintah Daerah akan diukur berdasarkan angka total aset kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan terlebih dahulu data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk mengatasi adanya ketidaklinearan hubungan antarvariabel.

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaannya operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Aziz, 2016).

Menurut (Natoen et al., n.d.) ukuran (*size*) pemerintah daerah adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran pemerintah daerah digunakan untuk mengetahui besar kecilnya obyek dari pemerintah daerah tersebut yang dapat dilihat dari total aset pemerintah daerah (Nugraheni, 2020).

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari beberapa komponen dan mampu menambah nilai kekayaan bersih yang dimiliki daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh seberapa besar sumber- sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin.

Pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa

“Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

2.2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, dan meningkatkan efektivitas biaya otonomi daerah. Pembagian dana perimbangan yang tidak merata, dapat berdampak pada ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, karena pada kenyataannya dana perimbangan hanya diberikan sebagai insentif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Potensi pendapatan tiap daerah tidaklah sama. Ada beberapa daerah dengan potensi pendapatan yang tinggi dan ada yang cukup rendah. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat berwenang untuk menyalurkan dana perimbangan ke setiap daerah di negara Indonesia. Dana perimbangan ini nantinya akan digunakan sebagai sumber dana tambahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, baik dalam roda pemerintahan maupun roda perekonomian daerahnya (Maulina afia, mustafa akmal, 2021).

Dana Perimbangan yang diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri

dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.2.4 Belanja Modal

Menurut Halim dan Abdullah (2007:101), belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Sedangkan Nordiawan (2007:33) menyatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Belanja modal juga digunakan sebagai salah satu indikator kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingginya persentase belanja modal terhadap total belanja pemerintah menunjukkan prioritas pemerintah dalam pengembangan aset dan infrastruktur untuk mendukung pembangunan jangka panjang (Yusuf, 2020). Selain itu, pengelolaan belanja modal yang baik mencerminkan tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah dalam menggunakan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Namun, perlu diingat bahwa tingginya belanja modal tidak selalu mencerminkan kinerja yang baik jika tidak diiringi dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap belanja modal harus mencakup aspek efisiensi, efektivitas, dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.

2.2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Dependen)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansii Pemerintah, mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja berasal dari pengertian performance. Pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaannya berlangsung.

Menurut (Anynda & Hermanto, 2020), Kinerja keuangan daerah merupakan komponen paling penting untuk mengukur suatu kinerja serta konsep dalam pengelolaan organisasi pemerintah dengan menjamin dalam menjalankan pertanggungjawabannya kepada masyarakat oleh lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian dalam suatu program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal itu, jika program yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan tercapainya suatu kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkualitas merupakan keberhasilan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil temuan
1	Rizki Artya Rahma Putri Dra. Lailatul Amanah, M.Si., Ak., CA, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya	2020	Variabel Dependen - inerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen - kuran Pemerintah Daerah - endapatan Asli Daerah - ana Perimbangan - elanja Modal	-Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Berdasarkan rasio kemandirian menunjukkan adanya pengaruh negatif secara signifikan. -Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Berdasarkan rasio kemandirian menunjukkan adanya pengaruh negatif secara signifikan. -Dana Perimbangan

				memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian
2	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabilla Salsa Fahira, Program Studi DIV Akuntansi Reguler Politeknik Keuangan Negara STAN	2021	Variabel Dependen - kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen - pendapatan Asli Daerah - ana Perimbangan - elanja Modal - kuran	-Terdapat hubungan positif dan signifikan untuk variabel Penda -Terdapat hubungan positif yang tidak signifikan untuk variabel Belanja Mo

			Pemerintah Daerah	
3	Berti Indah Sari, Helmawati, Jurnal Eksplorasi Akuntansi	2021	Variabel Dependen - kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen - pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum Belanja Daerah	-Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja -Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. -Belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah
4	Asma Al Husna,Dessi Susanti, Jurnal Sa lingkaNagari, Universitas	2022	Variabel Dependen - kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen	Terdapat dampak positif dan besar dari komponen PAD terhadap keuangan Kabupaten Solok

	Negeri Padang		- Pendapatan Asli Daerah	sesuai
5	Uthaylah, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi	2022	Variabel Dependen - kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen - ukuran Pemerintah Daerah - Pendapatan Asli Daerah - <i>Leverage</i> - ana Perimbangan - ukuran Legislatif	-Ukuran Pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. -Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah berdasarkan rasio efisiensi. -Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

				pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. -Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. -Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi
6	Ni Ketut Cintiari Kartikaningrum, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial	2023	Variabel Dependen - inerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen -	Secara Maupun stimulan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

	Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali		endapatan Asli Daerah - ana perimbangan - elanja modal	keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali
7	Vidia Utami Putri, Buntoro Heri Prasetya, Mutiaras Puspa Widyowati, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan, Bogor	2024	Variabel Dependen - inerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen - endapatan Asli Daerah - ana perimbanga - elanja modal	-Pendapatan Asli Daerah dan Dana Per -Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Per

--	--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti memfokuskan dalam empat variabel independen dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan, Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah”. Penelitian ini memiliki karakteristik yang membedakan dari studi lain dalam berbagai aspek. Pertama, fokus penelitian pada pengaruh ukuran pemerintah daerah merupakan hal penting karena ukuran pemerintah dapat mencerminkan besarnya tanggung jawab administrasi dan pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian juga mempelajari bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang merupakan sumber pendapatan utama daerah, berdampak terhadap kinerja keuangan. Sehingga dapat memberikan informasi mengenai hubungan langsung dan tidak langsung antara faktor tersebut dengan kinerja keuangan. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dinamika pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai landasan kebijakan keuangan yang lebih efektif.

2.4 Kerangka Penelitian Teoritis & Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah yang diproyeksikan dengan total aset yang dimiliki daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemudahan kegiatan operasional daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah. Selain kemudahan di

bidang operasional, ukuran pemerintah daerah yang besar memberikan kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dan nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah dengan pengelolaan yang optimal diharapkan menghasilkan kinerja yang semakin baik pula.

Pemerintah daerah memiliki tujuan utama dalam melaksanakan program kerja yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, pemerintah daerah harus didukung dengan aset yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut (Husna & Susanti, 2022). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sari & Mustanda, 2019b) bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin besar pula kapasitasnya untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran lebih besar cenderung memiliki anggaran yang lebih besar, sehingga mampu mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal. Selain itu, ukuran pemerintah daerah yang besar juga memungkinkan adanya diversifikasi pendapatan yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas keuangan. Dengan demikian, hipotesis bahwa ukuran pemerintah

daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki dasar empiris yang kuat, sebagaimana didukung oleh literatur terkait. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H¹ : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu dari sekian banyak kerangka dan infrastruktur yang secara empatik mempengaruhi perkembangan keuangan daerah (Rizky & Syahputra, 2022). Semakin besar perbaikan yang dilakukan maka dapat memperluas perkembangan kondisi kinerja keuangan daerah. Sebagai bentuk adanya perluasan fondasi perbaikan kerangka kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diyakini dapat mendorong pembangunan keuangan di kabupaten tersebut. Sebuah bentuk instrumen yang digunakan untuk memeriksa tampilan pemerintah daerah ketika menangani aset daerahnya adalah dengan memisahkan antara kinerja keuangan dibandingkan dengan realisasi APBD, terlebih jika ditinjau dari segmen PAD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adanya potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kontribusi

Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah naik maka dapat dikatakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota naik (meningkat) (Kartini & Astuti, n.d.).

Sedangkan menurut (Shafwah et al., 2024) berpendapat bahwa peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerahnya. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Antari & Sedana, 2018b), (Prastiwi & Aji, n.d.), (Husna & Susanti, 2022) yang menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa peningkatan PAD memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas keuangan daerah, efisiensi pengelolaan anggaran, dan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, hipotesis bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat berdasarkan bukti empiris dan teori ekonomi publik. Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut.

H²: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.

Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan apakah daerah tersebut memiliki sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk pemerintah daerah menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah (Hamzami Ulfi et al., 2022). Daerah dengan sumber daya sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu, dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun (Armaja et al., 2017).

Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Prastiwi & Aji, n.d.) membuktikan dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

sebab besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah mencerminkan kemandirian keuangan yang lemah dan rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi.

Hipotesis bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah didasarkan pada tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Tingginya penerimaan Dana Perimbangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama, sehingga mencerminkan kemandirian keuangan yang rendah. Kondisi ini berimplikasi pada kurangnya insentif bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal secara efisien, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan yang kurang optimal.

Jika dikaji dengan Teori Stewardship dana perimbangan dikucurkan untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan kepuasan masyarakat. Semakin tinggi alokasi dana yang diberikan maka akan memberikan dampak positif bagi daerah. Hal ini dapat berbeda jika dana perimbangan terlalu diandalkan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain terjadi ketergantungan. Ketergantungan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk karena tidak dapat mengeksplorasi potensi daerah.

H³ : Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk pembelian tanah, pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan, serta peralatan dan mesin yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pengalokasian belanja modal yang efisien dapat mencerminkan prioritas pembangunan yang berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang pemerintah daerah (Kementerian Dalam Negeri RI, 2006).

Belanja modal memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan aset yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan belanja modal yang baik menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti infrastruktur yang memadai. Namun, tingginya belanja modal juga dapat memberikan tekanan pada stabilitas keuangan jika tidak diiringi dengan perencanaan dan pengawasan yang baik (Mardiasmo, 2018). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi belanja modal yang tinggi, apabila tidak diimbangi dengan efisiensi, dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Wibowo et al., 2021).

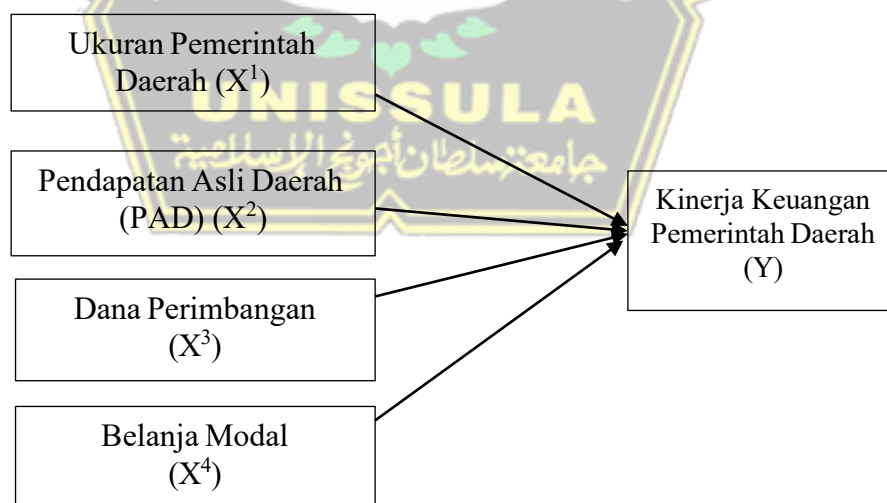
Jika dikaji melalui Teori Stewardship, belanja modal merupakan wujud tanggung jawab pengelola (steward) untuk memastikan penggunaan sumber daya publik secara efektif dan bertanggung jawab. Stewardship

mengasumsikan bahwa pengelola pemerintah daerah memiliki motivasi intrinsik untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui alokasi anggaran yang mendukung pembangunan jangka panjang. Dalam konteks ini, pengelolaan belanja modal yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kinerja keuangan daerah melalui pengembangan aset yang produktif (Halim, 2021).

H⁴: Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.5 Kerangka Penelitian

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independent (Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal. Serta variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah). Adapun kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatory research. Menurut Sugiyono (2017), eksplanatory research adalah metode penelitian yang menjelaskan kedudukan dari variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Lingkup dalam penelitian ini yakni menguji pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan jumlah dari subjek penelitian yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu untuk menjadi bahan penelitian dan dapat ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 6 pemerintah kota dan 29 kabupaten di Jawa Tengah selama tahun 2021-2023.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 pemerintah kota dan 29 kabupaten di Jawa Tengah yang berjumlah 35. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena penelitian membutuhkan data spesifik yang memiliki karakteristik tertentu. Sehingga sampel yang diambil adalah yang memenuhi kriteria relevan dengan tujuan penelitian. Berikut kriteria yang digunakan dalam penelitian:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan
2. Konsistensi Laporan Keuangan
3. Relevansi terhadap Masalah
4. Kualitas Laporan Keuangan

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah kategori data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian untuk memahami pengaruh variabel-variabel tertentu, yaitu ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diukur dalam bentuk angka untuk mendukung analisis hubungan antar variabel secara objektif.

Sumber data adalah tempat atau asal data yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah hipotesis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang sudah ada sebelumnya, bukan dihasilkan langsung oleh peneliti melalui survei atau wawancara. Data sekunder ini diperoleh dari <https://www.bps.go.id/id>.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi melalui pengumpulan data dengan cara mengambil data laporan keuangan yang dibutuhkan secara online berdasarkan permintaan informasi publik.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Penelitian variabel merupakan salah satu unsur yang penting karena suatu proses pengumpulan fakta dengan baik, bila dapat dirumuskan variabel penelitian dengan tegas (Nasution, 2017). Variabel didefinisikan sebagai subyek yang memiliki ragam berbeda antar obyek. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu dependen dan independen. Variabel dependen didefinisikan sebagai variabel terikat yang besarnya tergantung dari variabel lain. Sedangkan variabel independen didefinisikan sebagai variabel yang apabila muncul dapat mempengaruhi variabel lainnya yaitu variabel dependen. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Dependen)

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kinerjanya mencerminkan seberapa baik pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi anggaran serta penggunaan dana publik demi kepentingan masyarakat.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan rumus rasio efektivitas anggaran yang dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran dan anggaran yang ditetapkan. Langkah pertama dalam pengukuran ini adalah mengambil data dari anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran pemerintah daerah. Setelah itu membandingkan dengan jumlah anggaran yang telah terealisasi. Kemudian, menghitung rasio dengan membagi realisasi anggaran dengan

anggaran yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio, maka kinerja keuangan daerah semakin baik.

3.5.2 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah daerah merujuk pada cakupan dan skala operasional pemerintah daerah, termasuk besarnya wilayah, jumlah penduduk, kapasitas, dan kompleksitas tanggung jawab yang harus dikelola. Ukuran ini memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik, mengelola sumber daya, serta menjalankan fungsi administrative dan pemerintahan.

Pengukuran ukuran pemerintah daerah menggunakan rumus $\text{Size} = \ln$ (Total Aset Pemerintah Daerah). Total aset pemerintah daerah mencakup semua aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti aset tetap (Gedung, tanah, infrastruktur), dan aset lancar (kas, piutang). Rumus ini menggunakan logaritma natural ($\ln$) untuk mengurangi nilai yang besar, memudahkan analisis, dan mengatasi masalah distribusi data tidak normal. Langkah pertama adalah dengan mengambil data Total Aset Pemerintah Daerah yang tercatat dalam laporan keuangan tahunan. Setelah itu, menghitung logaritma natural dari jumlah total aset tersebut.

3.5.3 Pendapatan Asli Daerah (Variabel Independen)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri, dengan tujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya local demi kesejahteraan penduduknya tanpa bergantung pada dana transfer dari

pemerintah pusat.

Pengukuran PAD menggunakan rumus yang menggabungkan berbagai sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. $PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan} + \text{lain lain pendapatan daerah yang sah}$. Langkah pertama dalam pengukuran PAD adalah mengidentifikasi Pajak Daerah. Selanjutnya, menambahkan retribusi daerah seperti retribusi pasar atau retribusi izin usaha.

Kemudian menghitung hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan menambahkan semua pendapatan lain yang sah. Maka, hasil akhir penjumlahan seluruh komponen tersebut akan menghasilkan total pendapatan asli daerah (PAD) yang mencerminkan sumber daya keuangan daerah yang diperoleh secara internal.

3.5.4 Dana Perimbangan (Variabel Independen)

Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme keuangan pemerintah di Indonesia. Dana ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih besar untuk mengelola anggaran dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan local.

Pengukuran dana perimbangan menggunakan rumus yang menggabungkan berbagai komponen dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Langkah pertama dalam pengukuran adalah mengidentifikasi dana alokasi umum (DAU). Kemudian, menambahkan Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan terakhir menghitung Dana Bagi Hasil (DBH). Setelah menjumlahkan ketiga komponen dana tersebut maka akan diperoleh Dana Perimbangan, yang mencerminkan kontribusi dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi otonomi daerahnya.

3.5.5 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh, menambah atau memperbaiki aset tetap yang memiliki manfaat jangka Panjang seperti tanah, gedung, jalan, jembatan serta peralatan dan mesin. Belanja modal bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan public yang dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator presentaserealisasi belanja modal terhadap total belanja daerah. Rumus yang digunakan adalah Presentasi belanja modal yaitu realisasi belanja modal dibagi total belanja daerah X 100%. Sumber data untuk variabel belanja modal diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah diaudit. Pengukuran ini mencerminkan seberapa besar alokasi belanja modal dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan public dibandingkan dengan total pengeluaran pemerintah daerah secara keseluruhan.

3.5.6 Definisi Operasional Variabel Pengukuran Variabel

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Konsep	Pengukuran	Referensi
1	Kinerja Keuangan	Menurut peraturan	Rasio Keserasian	Susanti,

	Pemerintah Daerah	menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, kinerja keuangan daerah adalah hasil dari kegiatan atau program yang telah dicapai dalam penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai rasio keserasian. Rasio keserasian dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator untuk menilai efisiensi, efektivitas dan kemandirian keuangan daerah.	$\text{Pendapatan Operasional} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Belanja Operasional}} \times 100$	2020
2	Ukuran Pemerintah Daerah	Ukuran pemerintah daerah adalah tolak ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah. Biasanya terlihat dari	$\text{Size} = \ln \text{ Total Aset Pemerintah Daerah}$	Yulianto, 2018

		total aktivitas, luas wilayah dan jumlah penduduk		
3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain.	Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Restribusi Daerah + Hasil	Iskandar, 2020
4	Dana Perimbangan	Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan yang digelontorkan oleh pusat kepada daerah berbentuk antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).	Dana Perimbangan = Dana alokasi umum (DAU) + Dana Alokasi Khusus (DAK) + Dana Bagi Hasil (DBH)	Wido, 2020
5	Belanja	Belanja modal	Presentase belanja modal	Yusuf

	Modal	adalah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk memperoleh aset tetap atau modal.	$= \frac{\text{Nilai Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100$	, M. (2020).
--	-------	---	--	--------------

3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis di atas, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data untuk menguji hipotesis dan memecahkan masalah. Adapaun alat yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah SPSS versi 25.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Dengan statistik deskriptif, maka kita dapat mengetahui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Data penelitian yang terdapat pada penelitian ini meliputi ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model yang digunakan. Berikut uji asumsi klasik yang akan dilakukan:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu pengujian yang berfungsi untuk menguji apakah data pada variabel bebas dan terikat pada persamaan regresi,

menghasilkan data yang berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Model yang digunakan untuk mendeteksi uji normalitas dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov Smirnov*. Syarat dalam uji normalitas yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* adalah:

1. Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti data berdistribusi normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti data tidak berdistribusi normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2018), pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik apabila diuji maka tidak akan berkorelasi. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF-nya (*Variance Inflation Factor*) dengan bantuan program *Statistical Product and service Solution* (SPSS). Regresi bebas dari masalah Multikolinieritas jika nilai Tolerance lebih dari 10 persen (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10,00.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Gletjer untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam sebuah model regresi. Dalam uji Gletjer, data residual diambil dari model regresi kemudian melakukan regresi kembali dengan nilai absolut residual. Jika hasil regresi menunjukkan koefisien yang signifikan secara statistik, maka terjadi indikasi adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya jika koefisien tidak signifikan, maka

asumsi homoskedastisitas dapat terpenuhi.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini juga dapat digunakan sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 40 turunkan nilainya). Analisis ini dilakukan jika variabel independennya minimal dua yang dimasukkan dalam model regresi ini (Sugiyono, 2015).

$$Y = a + b_1Up + b_2PAD + b_3DP + b_4BM + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = kinerja keuangan pemerintah daerah

a = konstanta

b₁ = koefisien regresi ukuran pemerintah daerah

b₂ = koefisien regresi pendapatan asli daerah

b₃ = koefisien regresi dana perimbangan

b₄ = koefisien regresi belanja modal

X₁ = ukuran pemerintah daerah

X₂ = pendapatan asli daerah

X₃ = dana perimbangan

X₄ = Belanja Modal

ε = error term model (variabel residual)

3.6.4 Uji Kelayakan Model

3.6.4.1 Uji Statistik F (Signifikan Simultan)

Uji kelayakan model atau uji F adalah pengujian untuk menentukan apakah model regresi yang diusulkan dapat diterima atau ditolak. Uji

kelayakan model dengan Uji F dapat dideteksi melalui langkah berikut:

a. Menentukan Hipotesis Statistik

- $H_0 : \beta_i = 0$, maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
- $H_a : \beta_i \neq 0$, maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05, hal tersebut berarti toleransi tingkat kesalahan adalah 0,05.

c. Penilaian Kriteria Keputusan

- Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.2 Analisis Koefisiensi Determinasi

Analisis koefisiensi determinasi atau R-kuadrat (R^2) adalah pengukuran statistik yang digunakan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Semakin kecil nilai koefisien determinasi (R^2) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Jika nilai koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati 1 berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat (Sugiyono, 2015).

Nilai koefisien determinan ditunjukkan dengan nilai Adjusted R

square bukan R Square dari model regresi karena R Square bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan Adjusted R square dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model.

3.1.1 Uji Parsial (uji T)

Uji Parsial (uji t) digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen (ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal) terhadap variabel dependen (Kinerja keuangan pemerintah) dilakukan dengan menggunakan uji t (t-test).

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai provinsi, salah satunya provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah kesatuan yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada ditengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas sekitar 32.548 kilometer persegi. Wilayah ini memiliki bentang alam yang beragam, seperti pegunungan, dataran tinggi, pantai dan dataran rendah. Adapun diantaranya seperti Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, dan Sumbing turut membentuk karakter geografis provinsi ini.

Secara administratif provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 daerah otonom, yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota. Keenam kota tersebut adalah Semarang, yang juga merupakan ibu kota provinsi, serta Surakarta (Solo), Pekalongan, Tegal, Magelang, dan Salatiga, dengan peranan penting masing-masing kota dalam membangun sektor ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan di Jawa Tengah. Dengan letaknya yang strategis dan kekayaan budaya yang dimiliki, Jawa Tengah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi di Pulau Jawa maupun secara nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada laporan

keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang waktu yang digunakan yaitu selama tahun 2021-2022. Sample dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling*, dari 31 laporan keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah selama 3 tahun dengan data yang diperoleh sebanyak 93 data pengamatan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan suatu keadaan variabel penelitian secara statistik, dengan nilai rata-rata, simpangan baku (*Std.Deviation*), nilai minimum dan maksimum dari seluruh variabel dalam penelitian ini. Sebagaimana tertera dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	93	16,00	31,00	28,09	2,57
Pendapatan Asli Daerah (X2)	93	25,00	28,00	25,96	0,67
Dana Perimbangan (X3)	93	26,00	35,00	27,80	0,96
Belanja Modal (X4)	93	-3,00	12,00	2,80	1,96
Kinerja Keuangan (Y)	93	-2,00	15,00	4,74	1,94

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa :

- a. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 16,00 atau persentase 16% dan nilai maksimum sebesar 31,00 atau persentase 31%, nilai rata-ratanya sebesar 28,09 atau persentase 28% dan nilai standar deviasi sebesar 2,57 atau persentase 2%, artinya nilai standar deviasi ukuran pemerintah daerah lebih kecil daripada nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sebaran ukuran pemerintah daerah menyebar secara merata.
- b. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 25,00 atau persentase 25% dan nilai maksimum sebesar 28,00 atau persentase 28%, nilai rata-ratanya sebesar 25,96 atau persentase 26% dan nilai standar deviasi sebesar 0,67 atau persentase 1%, artinya nilai standar deviasi pendapatan asli daerah lebih kecil daripada rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sebaran pendapatan asli daerah menyebar secara merata.
- c. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa variabel dana perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 26,00 atau persentase 26% dan nilai maksimum sebesar 35,00 atau persentase 35%, nilai rata-ratanya sebesar 27,80 atau persentase 28% dan nilai standar deviasi sebesar 0,96 atau persentase 1%, artinya nilai standar deviasi dana perimbangan lebih kecil daripada rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sebaran dana perimbangan menyebar secara merata.

- d. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa variabel belanja modal memiliki nilai minimum sebesar -3,00 atau persentase -3% dan nilai maksimum sebesar 12,00 atau persentase 12%, nilai rata-ratanya sebesar 2,80 atau persentase 3% dan nilai standar deviasi sebesar 1,96 atau persentase 2%, artinya nilai standar deviasi belanja modal lebih kecil daripada rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sebaran belanja modal menyebar secara merata.
- e. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa variabel kinerja keuangan memiliki nilai minimum sebesar -2,00 atau persentase -2% dan nilai maksimum sebesar 15,00 atau persentase 15%, nilai rata-ratanya sebesar 4,74 atau persentase 5% dan nilai standar deviasi sebesar 1,94 atau persentase 2%, artinya nilai standar deviasi kinerja keuangan lebih kecil daripada rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sebaran kinerja keuangan menyebar secara merata.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk menguji masing-masing variabel dalam model regresi untuk melihat variabel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2020). Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *kolmogorov-smirnov test*, dengan nilai *kolmogorov-smirnov* signifikan lebih besar dari 0,05, yang berarti data residual berdistribusi normal, atau

model analisis regresi dikagalan baik dan tepat). Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		93
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	,27145512
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,109
	<i>Positive</i>	,109
	<i>Negative</i>	-,109
<i>Test Statistic</i>		,109
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,012 ^c

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian normalitas pada penelitian ini diperoleh nilai signifikansi atau *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,012 atau lebih besar dari 0,05, artinya data residual pada penelitian ini berdistribusi normal, sehingga model regresi ini layak untuk dianalisis lebih lanjut.

4.2.2.2 Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dalam penelitian ini digunakan karena penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel bebas (independen) dalam model regresi. Jika pada uji ini variabel independen (bebas) terbukti saling terikat maka, pengujian tidak dapat dilanjutkan, karena ketiadaan multikolinearitas pada variabel penelitian merupakan syarat dalam model regresi. Dalam penelitian ini uji multikolineritas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,1$ artinya data yang diuji dapat dikatakan memiliki multikolinearitas, akan

tetapi jika nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$ artinya data yang diuji tidak memiliki multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistic</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	0,936	1,068
Pendapatam Asli Daerah (X2)	0,823	1,215
Dana Perimbangan (X3)	0,848	1,180
Belanja Modal (X4)	0,992	1,008

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *tolerance* pada setiap variabel penelitian $> 0,1$ dan nilai VIF pada setiap variabel penelitian < 10 , artinya nilai *tolerance* masing-masing variabel penelitian lebih dari 0,1. Begitupun dengan nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas, sehingga penelitian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variansi dalam model regresi, dengan menggunakan uji *glejser* yang akan mengkorelasikan *absolute* residual dengan variabel bebas, dengan nilai signifikansinya $> 0,05$ maka variabel dinyatakan bebas heteroskedastisitas (Ghozali, 2020). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	0,585
Pendapatam Asli Daerah (X2)	0,764
Dana Perimbangan (X3)	0,668
Belanja Modal (X4)	0,643

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji heterokedastisitas dengan uji *glejser* menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel ukuran pemerintah daerah, variabel pendapatan asli daerah, variabel dana perimbangan, dan variabel belanja modal lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan pada penelitian ini untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2020). Hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		t	Sig.
	B	Std. Error		
<i>Constant</i>	8,587	7,760	1,107	0,271
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	0,189	0,074	2,558	0,012
Pendapatam Asli Daerah (X2)	-0,519	0,310	-1,676	0,097
Dana Perimbangan	0,110	0,210	0,523	0,602

(X3)				
Belanja Modal (X4)	0,380	,091	4,162	0,000

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa :

$$Y = 8,587 + 0,189X_1 + -0,519X_2 + 0,110X_3 + 0,380X_4 + 10\%e$$

- Berdasarkan Berdasarkan hasil uji pada penelitian ini nilai konstanta sebesar 8,587 dan nilai sig 0,271 ($> 5\%$) , artinya jika semua variabel independen ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal dianggap konstan, maka besarnya kinerja keuangan adalah nol (tidak ada perubahan).
- Nilai koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah (X1) sebesar 0,189 dan nilai sig 0,012 ($< 5\%$), artinya ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan atau dapat dikatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan .
- Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (X2) sebesar - 0,519 dan nilai sig 0,097 ($> 5\%$), artinya pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan atau dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- Nilai koefisien regresi variabel dana perimbangan (X3) sebesar 0,110 dan nilai sig 0,602 ($> 5\%$), artinya dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan atau dapat dikatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

- e. Nilai koefisien regresi variabel belanja modal (X4) sebesar 0,380 dan nilai sig 0,000 ($< 5\%$), artinya belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran belanja modal maka akan meningkat juga kinerja keuangannya.

4.2.5 Uji Kelayakan Model

4.2.5.1 Uji F

Uji F pada penelitian digunakan untuk mengetahui kelayakan model penelitian yang digunakan, dengan nilai signifikansi dibawah 0,05. Selain itu, uji F juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2020). Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

Model		<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	Regression	71,178	4	17,795	6,221	,000 ^b
	Residual	251,718	88	2,860		
	Total	322,896	92			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2						

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 6,221 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau $< 0,05$, yang berarti bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh positif secara

simultan terhadap variabel dependen atau model penelitian dalam penelitian dikatakan layak atau sangat layak karena kurang dari 0,05.

4.2.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan nilai R^2 berposisi antara 0 dan 1. Artinya jika nilai koefisien determinasi tinggi atau bernilai besar maka variabel independen dapat memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan variabel dependen, begitupun sebaliknya (Ghozali, 2020). Hasil uji koefisien determinan (R^2) dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,470 ^a	0,220	0,185	1,69128
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2				

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil perhitungan uji R^2 dapat dikatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) memperoleh nilai sebesar 0,185. Artinya, pengaruh yang diberikan oleh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal dalam menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel kinerja keuangan hanya sebesar 18,5% sedangkan 81,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian

4.2.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji t pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikan $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_a diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen, atau melakukan perbandingan antara t hitung dan t tabel dengan $df = n - k$, $df = 99 - 3$ (Ghozali, 2020). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4. 8 Hasil Uji T

Model	T	Sig.	Keterangan
<i>Constant</i>	1,107	0,271	
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	2,558	0,012	Diterima
Pendapatan Asli Daerah (X2)	-1,676	0,097	Ditolak
Dana Perimbangan (X3)	0,523	0,602	Ditolak
Belanja Modal (X4)	4,162	0,000	Diterima

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil perhitungan uji signifikansi dengan nilai signifikan sebesar 0,012, dapat diartikan bahwa hipotesis 1 diterima, artinya ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena memiliki nilai

signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan memiliki t hitung lebih besar dari pada t tabel 1.661.

- b. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil perhitungan uji signifikansi dengan nilai signifikan sebesar 0,097, dapat diartikan bahwa hipotesis 2 ditolak, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan memiliki t hitung lebih kecil dari pada t tabel 1.661.

- c. Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil perhitungan uji signifikansi dengan nilai signifikan sebesar 0,602, dapat diartikan bahwa hipotesis 3 ditolak, artinya dana perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan memiliki t hitung lebih kecil dari pada t tabel 1.661.

- d. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil perhitungan uji signifikansi dengan nilai signifikan sebesar 0,000, dapat diartikan bahwa hipotesis 4 diterima, artinya belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan memiliki t hitung lebih besar

dari pada t tabel 1.661.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa bahwa H_1 di terima dengan nilai signifikansi variabel ukuran pemerintah daerah $0,012 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $2,558 > 1.661$, artinya ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah suatu daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jauhari dan Dewata (2019), Mulyani dan Wibow (2017) dan Alvini (2018) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena semakin besar tanggungjawab pemerintah daerah akan semakin mendorong birokrasi untuk berinovasi dalam mewujudkan kinerja keuangan yang sesuai dengan harapan konstituennya. (Bunga, et al 2022).

Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, bahwa semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, maka sebagai *steward*, pemerintah akan memberikan pelayanan maksimal kepada publik melalui peningkatan kinerja keuangan. Artinya semakin besar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula kesempatan pemerintah daerah dalam pemanfaatan pembiayaan untuk menjaga

kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sebagai pemimpin (Bunga, et al 2022).

4.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa H2 ditolak dengan nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah $0,097 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $-1,676 > 1.661$, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah suatu daerah tidak menjamin adanya pengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2021) bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki suatu daerah, maka tidak akan mempengaruhi keputusan dalam menggunakan pendapatan asli daerah, karena segala bentuk kebutuhan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah, jadi tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Azhar, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* bahwa organisasi tidak semata-mata tergantung pada seberapa besar sumber daya yang dimiliki, melainkan pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola dengan penuh tanggungjawab oleh para pengelolanya. Artinya meskipun pendapatan asli daerah merupakan indikator kemandirian fiskal daerah,

akan tetapi jika pengelolaannya tidak berorientasi pada kepentingan publik, maka seberapa besar penerimaan PAD tetap tidak akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa peran *steward* atau pengelola keuangan daerah sangat penting dalam memastikan bahwa setiap sumber daya, termasuk PAD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan keuangan daerah (Azhar, 2021).

4.3.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa H3 ditolak dengan nilai signifikansi variabel dana perimbangan $0,602 < 0,05$ dengan *t* hitung sebesar $0,523 > 1,661$, artinya dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar dana perimbangan maka kemungkinan besar dapat mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Digdowiseiso et al., (2022) dan Purnama, (2016) bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya seberapa besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah tidak menjamin tercapainya kinerja keuangan yang lebih baik. Sebab Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pusat, kurangnya inovasi dalam pengelolaan keuangan, atau alokasi dan penggunaan dana yang belum optimal (Niken

dan Achmad, 2024).

Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* bahwa pengelola publik bertindak sebagai pelayan masyarakat yang memiliki tujuan yang selaras dengan kepentingan publik. Artinya meskipun pemerintah pusat telah memberikan dukungan fiskal melalui dana perimbangan, peran dan sikap *stewardship* dari pemerintah daerah tetap menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa dana dikelola dengan baik yang kemudian akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Jadi, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah lebih dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dan tanggung jawab *stewardship*, bukan semata-mata karena besarnya dana yang tersedia (Niken dan Achmad, 2024).

4.3.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa bahwa H4 di terima dengan nilai signifikansi variabel belanja modal $0,012 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $2,558 > 1.661$, artinya belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar alokasi dan realisasi belanja modal oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan yang dicapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa et al, (2016), Alvini (2018) dan Sari dan Mustanda (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah daerah pada sektor-sektor dalam pemerintahan benar-benar mampu mendorong efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sebab modal telah dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pada suatu daerah. Sehingga dengan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai mampu meningkatkan tingkat efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Jannah, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, bahwa semakin besar belanja modal pemerintah daerah maka semakin meningkat pula tingkat efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebab pemerintah daerah selaku *steward* merupakan lembaga yang dipercaya menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dan pengelolaan belanja modal yang optimal akan selalu membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah (*steward*) dengan rakyat (*principal*) dalam memberikan kepuasan bagi publik sehingga dapat mendukung terciptanya kinerja keuangan pemerintah daerah (Jannah, 2019).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa bahwa H_1 di terima, artinya semakin besar ukuran pemerintah suatu daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya, karena semakin besar tanggungjawab pemerintah daerah maka akan semakin mendorong birokrasi untuk berinovasi dalam mewujudkan kinerja keuangan yang sesuai dengan harapan konstituennya.

2. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa H2 ditolak, artinya semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki suatu daerah, maka tidak akan mempengaruhi keputusan dalam menggunakan pendapatan asli daerah, karena segala bentuk kebutuhan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah, jadi tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa H3 ditolak, artinya seberapa besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah tidak menjamin tercapainya kinerja keuangan yang lebih baik, hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pusat, kurangnya inovasi dalam pengelolaan keuangan, atau alokasi dan penggunaan dana yang belum optimal.
4. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa bahwa H4 di terima, artinya semakin besar alokasi dan realisasi belanja modal oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan yang dicapai. Dan pengelolaan belanja modal yang optimal akan selalu membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah (steward) dengan rakyat (principal) dalam memberikan kepuasan bagi publik sehingga dapat mendukung terciptanya kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain

selain ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal untuk dapat diteliti lebih lanjut, serta menambah subjek permasalahan untuk mendapatkan temuan baru yang lebih komprehensif.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas ruang lingkup penelitian seperti laporan keuangan pemerintah daerah di beberapa provinsi diseluruh Indonesia sehingga ada perbandingan yang lebih signifikan karena pada penelitian ini hanya berfokus pada laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengambilan data memakan waktu yang cukup lama karena menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah dengan akses untuk memperoleh laporan keuangan yang sulit untuk didapatkan dan harus melalui izin dan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berkepentingan.
2. Variabel dalam penelitian ini terbatas, hanya meneliti empat variabel independen, sehingga masih ada beberapa variabel independen yang belum diketahui pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam penelitian ini selain empat variabel yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Serta Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalbar . *Prosiding Program Studi Ekonomi Islam 2024*, (2), 261-272.
- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–14.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018a). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2018.V7.I02.P19>
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.24815/Jped.V3i2.8229>
- Azhar, I. (2021). *The Effect Of Regional Local Revenue On Financial Performance Of The Langsa City Government*. *Jurnal Transformasi Administrasi*, (1), 164-174.
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 86–101. <https://doi.org/10.26533/Eksis.V11i1.34>
- Bunga Widya Safitri. Novi Dirgantari, E. H. (2022). Pengaruh PAD, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Dan Perubahan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). *Jurnal Ek&Bi*, (5), 401-409.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzami Ulfi, I., Nur Afiah, N., & Mulyani, S. (2022). Implikasi Belanja Modal Dan E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Bangka Belitung Dan Sumatera Selatan. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 5(2), 70–83. <https://doi.org/10.24905/Igi.V5i2.65>
- Husna, A. U., & Susanti, D. (2022a). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Di Kabupaten Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(2), 153–163. <https://doi.org/10.24036/Jsn.V1i2.31>
- Janah, M. (2019). *The Effect Of Government Size, Intergovernmental Revenue, Regional Expenditure And Capital Expenditure To The Financial Performance Of Regioanal Government (Empirical Study On*

District And City Governments In Central Java Province period 2013-2017). *Prosiding 2nd Business And Economics Conference In Utilizing Of Modern Techonolgy*, 239-253.

- Kartini, N., & Astuti, E. (N.D.). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kabupaten Lombok Timur*.
- Maulina Afia, Mustafa Akmal, N. S. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research.*, 5(2), 523–531. <https://doi.org/10.52362/Jisamar.V5i2>
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Nugraheni, E. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 201*, 2(1), 41–49.
- Nurlita, M. (2019). *No Title pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Primbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2017)*.
- Padang, N. N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (Jimat)*, 2(2), 163–176.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (N.D.). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota Di*.
- Purwanti, D. (2021). Determinasi Kinerja Keuangan Perusahaan: Analisis Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 692–698. <https://doi.org/10.31933/Jimt.V2i5.593>
- Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(06), 832–846. <https://doi.org/10.46799/Jst.V3i6.572>
- Rizky, Z., & Syahputra, D. K. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal.

Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(1), 47–59.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545>

Rahmawati, F., & Basuki, H. (2020). "Pengelolaan Dana Perimbangan dalam Mendukung Pembangunan Daerah: Perspektif Teori Stewardship". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(1), 45-60.

Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019a). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
<https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2019.V08.I08.P02>

Shafwah, R., Masradin, M., & Mukhtar, A. (2024). Pendapatan Asli Daerah (Pad): Kunci Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 282–289.
<https://doi.org/10.46576/Bn.V7i1.4503>

Sutrisno, E., & Widodo, A. (2021). "Kompleksitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Ukuran Pemerintah Daerah". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik*, 15(2), 101-120.

Sugiyono, Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi), Cv Alfabeta, 2018 .

